



PENGADILAN TINGGI GORONTALO

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO SEMESTER I TAHUN 2024 005.01.3100.664539





**LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2024**

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

BAGIAN ANGGARAN 005.01.3100.664539

Gorontalo, Juli 2024

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

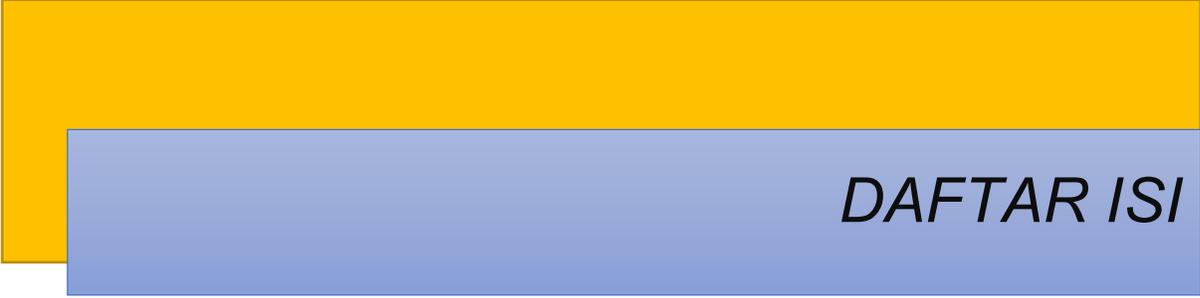
Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Gorontalo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Gorontalo, Juli 2024
SEKRETARIS

BENNY A. WALUKOW, SE
NPK 19740418 200502 1 001



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	35
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	40
F. Pengungkapan Penting Lainnya	43
VI. Lampiran dan Daftar	

(Lampiran berupa cetakan dari aplikasi SAKTI dan lampiran lainya yang mendukung) seperti

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Realisasi Belanja
3. Laporan Pengembalian Belanja
4. Laporan Realisasi Pendapatan
5. Laporan Pengembalian Pendapatan

6. Neraca Percobaan
7. Laporan Operasional
8. Laporan Perubahan Ekuitas
9. Neraca
10. Berita Acara Opname Fisik Persediaan
11. BAR Internal
12. Surat Hasil Rekonsiliasi
13. Dokumen Lainnya



DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2024 dan 2023	3
Tabel Neraca Per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023	4
Tabel Laporan Operasional Per 30 Juni 2024 dan 2023	6
Tabel Perubahan Ekuitas Per 30 Juni 2024 dan 2023	7
Tabel Perhitungan Penyisihan Piutang	14
Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	18
Tabel Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	20
Tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2024 dan Per 30 Juni 2023	21
Tabel Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2024	21
Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2024 dan Per 30 Juni 2023	22
Tabel Perbandingan Belanja Pegawai Per 30 Juni 2024 dan Per 30 Juni 2023	23
Tabel Perbandingan Belanja Barang Per 30 Juni 2024 dan Per 30 Juni 2023	24
Tabel Perbandingan Belanja Modal Per 30 Juni 2024 dan Per 30 Juni 2023	24
Tabel Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023	25
Tabel Rincian Belanja Dibayar Dimuka per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023	25
Tabel Rincian Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023	26
Tabel Rincian Persediaan Per 30 Juni 2024 dan Per 31 Desember 2023	27
Tabel Mutasi Nilai Tanah Per 30 Juni 2024 dan Per 31 Desember 2023	27
Tabel Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2024	28
Tabel Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2024 dan Per 31 Desember 2023	28
Tabel Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan Per 30 Juni 2024 dan Per 31 Desember 2023	29
Tabel Mutasi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per 30 Juni 2024 dan Per 31 Desember 2023	29
Tabel Rincian Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023	30
Tabel Mutasi Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan Per 31 Desember 2023	30
Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 30 Juni 2024	30

Tabel Mutasi Transaksi Terhadap Aset Tak Berwujud Per 30 Juni 2024	31
Tabel Rincian Aset Tak Berwujud Per 30 Juni 2024	31
Tabel Mutasi Aset Lain-Lain Per 30 Juni 2024	32
Tabel Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Per 30 Juni 2024	32
Tabel Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Per 30 Juni 2024	33
Tabel Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 30 Juni 2024	35
Tabel Rincian Beban Pegawai Per 30 Juni 2024	35
Tabel Rincian Beban Persediaan Per 30 Juni 2024	36
Tabel Rincian Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2024	37
Tabel Rincian Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2024	38
Tabel Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2024	38
Tabel Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2024	39
Tabel Rincian Kegiatan Non Operasional Per 30 Juni 2024	39
Tabel Rincian Koreksi Lain-lain Per 30 Juni 2024	41
Tabel Rincian Transaksi Antar Entitas TA. 2022	41

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI GORONTALO**

Jalan Tinaloga.No.2 Kel. Dulomo Selatan Kec. Kota Utara Kota Gorontalo
Website ; www.pt-gorontalo.go.id Email : info@pt-gorontalo.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gorontalo, Juli 2024
SEKRETARIS

BENNY A. WALUKOW,S.E
NIP. 19740415 200502 1 001

RINGKASAN

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Gorontalo Tahunan 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I Tahun 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp11.606.960 atau mencapai 50.43 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp23.017.000.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I Tahun 2024 adalah sebesar Rp7.135.356.221 atau mencapai 46.96 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp15.195.493.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024.

Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 20.925.022.898; yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp60.855.206; Aset Tetap (*netto*) sebesar Rp20.864.167.692; Piutang Jangka Panjang (*netto*) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (*netto*) sebesar Rp0.

Nilai kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp796.274.974 dan Rp 20.128.747.924.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode 01 Januari 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp13.329.251, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp8.167.846.567 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp8.154.517.316. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp8.154.517.316.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp21.159.515.979 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp8.154.517.316, kemudian ditambah dengan Koreksi Lain-Lain sebesar Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp7.123.749.261 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp20.128.747.924.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode Semester I Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I.

*LAPORAN REALISASI
ANGGARAN*

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN TINGGI GORONTALO LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2024		% thd Angg	30 JUNI 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	23,017,000	11,606,960	50.43	15,560,738
JUMLAH PENDAPATAN		23,017,000	11,606,960	50.43	15,560,738
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	12,990,482,000	6,015,232,748	46.30	5,683,342,910
Belanja Barang	B.2.1	2,205,011,000	1,120,123,473	50.80	1,090,013,250
Belanja Modal	B.2.1	-	-	#DIV/0!	-
JUMLAH BELANJA		15,195,493,000	7,135,356,221	46.96	6,773,356,160

Gorontalo, 18 Juli 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Remy Walukow, S.E
NIP. 197104182005021001



II.

NERACA

II. NERACA

PENGADILAN TINGGI GORONTALO NERACA PER 30 JUNI 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2024	31 DES 2023
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1	50,100,000	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1.2	-	9,473,850
Piutang Bukan Pajak	C.1.3	1,722,291	-
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	C.1.4	1,722,291	-
Persediaan	C.1.5	9,032,915	17,202,182
JUMLAH ASET LANCAR		60,855,206	26,676,032
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	7,602,649,000	7,602,649,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	5,285,284,031	5,285,284,031
Gedung dan Bangunan	C.2.3	15,399,408,200	15,399,408,200
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.4	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.2.5	28,199,905	28,199,905
Akumulasi Penyusutan	C.2.6	(7,451,373,444)	(7,157,331,322)
JUMLAH ASET TETAP		20,864,167,692	21,158,209,814
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Tak Berwujud	C.3.1	29,985,000	29,985,000
Aset Lain-Lain	C.3.2	-	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3	(29,985,000)	(29,985,000)
JUMLAH ASET LAINNYA		-	-
JUMLAH ASET		20,925,022,898	21,184,885,846
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1	745,536,974	25,369,867
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.4.2	638,000	-
Uang Muka dari KPPN	C.4.3	50,100,000	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		796,274,974	25,369,867
JUMLAH KEWAJIBAN		796,274,974	25,369,867
EKUITAS			
EKUITAS	C.5		
Ekuitas		20,128,747,924	21,159,515,979
JUMLAH EKUITAS		20,128,747,924	21,159,515,979
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		20,925,022,898	21,184,885,846

Gorontalo, 19 Juli 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Benny A. Walukow, S.E
NIP. 197404182005021001



III.

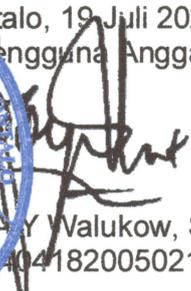
LAPORAN OPERASIONAL

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN TINGGI GORONTALO LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	PER 30 JUNI 2024	PER 30 JUNI 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	13,329,251	12,536,243
JUMLAH PENDAPATAN		13,329,251	12,536,243
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6,701,405,753	6,323,212,562
Beban Persediaan	D.3	34,827,567	74,274,940
Beban Barang dan Jasa	D.4	803,962,844	781,112,589
Beban Pemeliharaan	D.5	228,903,936	203,934,998
Beban Perjalanan Dinas	D.6	104,704,345	141,566,600
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	294,042,122	322,718,855
JUMLAH BEBAN		8,167,846,567	7,846,820,544
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(8,154,517,316)	(7,834,284,301)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8		4,675,000
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			2,224,750
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			2,450,250
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(8,154,517,316)	(7,831,834,051)
POS LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa	D.9	0	0
SURPLUS/DEFISIT-LO		(8,154,517,316)	(7,831,834,051)

Gorontalo, 19 Juli 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Renny A Y Walukow, S.E
NIP. 197404182005021001

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN TINGGI GORONTALO LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2024	30 JUNI 2023
EKUITAS AWAL	E.1	21,159,515,979	21,564,833,908
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(8,154,517,316)	(7,831,834,051)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3.1		
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.3.4	0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	0	0
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.7	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	7,123,749,261	6,775,164,172
EKUITAS AKHIR	E.5	20,128,747,924	20,508,164,029

Gorontalo, 19 Juli 2024
 Kepala Pengguna Anggaran,

 Benny A. Walukow, S.E
 NIP. 197404182005021001

V.

*CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 471 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Pada Pemerintah Pusat;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
 17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
 18. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
 19. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
 20. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis AkruaI dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
 22. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-15/PB/PB.6/2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Semester I Tahun 2024.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan tupoksi Pengadilan Tinggi Gorontalo yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi yang ingin diwujudkan.

Sejalan dengan tujuan dan keinginan sebagaimana telah diuraikan dalam kebijaksanaan umum peradilan yang ada di Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagaimana diuraikan dalam *BluePrint* Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang merupakan sebuah pedoman/arah

pendekatan yang akan ditempuh, Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai visi yang sejalan dengan visi Mahkamah Agung RI.

Visi Pengadilan Tinggi Gorontalo dapat dirumuskan sebagai berikut :
“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Gorontalo Sebagai Peradilan Yang Agung”

Untuk mewujudkan dan mencapai Visi Pengadilan Tinggi Gorontalo maka ditetapkan misi Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Gorontalo;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Gorontalo;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Untuk mewujudkan Visi, Misi yang telah ditetapkan Pengadilan Tinggi Gorontalo mempunyai sasaran strategis yang terdiri dari :

1. Peningkatan penyelesaian perkara;
2. Peningkatan aksesibilitas terhadap putusan Hakim;
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan;
5. Peningkatan kualitas pengawasan;
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam melakukan pengelolaan keuangan meliputi tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI mencakup seluruh pengelolaan keuangan negara pada satker yang masing-masing pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi seperti modul penganggaran, modul komitmen, modul bendahara, modul aset tetap, modul persediaan, modul pembayaran, modul piutang dan modul GL dan pelaporan.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Urusan Administrasi MA yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo. Disamping itu, dalam

penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatandisajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh

pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat

keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bias diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan catatan jumlah unit pada tanggal

neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi PMK Nomor 181/PMK.06/2016 sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga dan ATR yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan dan ATR yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian

dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkup Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara Umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
<i>Software</i>	4 Tahun
<i>Franchise</i>	5 Tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomo Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta asta Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka

pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hingga saat ini satker Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melakukan 2 (dua) kali revisi hingga akhir periode Semester I Tahun 2024 ini. Hal ini dapat dilihat dari rincian DIPA dibawah ini:

Rincian Perubahan DIPA Tahun Anggaran Per 30 Juni 2024

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan PNPB	23,017,000	23,017,000
Jumlah Pendapatan	23,017,000	23,017,000
Belanja		
Belanja Pegawai	12,990,482,000	12,990,482,000
Belanja Barang	2,205,011,000	2,205,011,000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	15,195,493,000	15,195,493,000

Revisi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Penyesuaian anggaran berupa pergeseran pada sub anggaran belanja barang.

Realisasi
Pendapatan
Rp11.606.960

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp11.606.960. Rincian realisasi pendapatan adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Per 30 Juni 2024

Uraian	2024		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real. Pendapatan
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, luran Badan Usaha	23,017,000	11,606,960	50.43
Jumlah	23,017,000	11,606,960	50.43

Realisasi Pendapatan dari Pengelolaan BMN per 30 Juni TA 2024 secara keseluruhan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 25,41%. Pada periode semester I tahun 2024 tidak terdapat pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berasal dari sewa 5 (lima) unit rumah dinas yang ditempati oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, dan Panitera, serta pendapatan sewa tanah sebagian tanah di lingkungan kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo seluas 30m²

yang diperuntukkan bagi usaha kantin. Terdapat kenaikan 6.63 persen pada Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan disebabkan adanya penyesuaian tarif sewa atas sebagian tanah gedung kantor yang diperuntukkan sebagai kantin tersebut.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan
per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023*

URAIAN	REALISASI PER 30 JUNI T.A. 2024	REALISASI PER 30 JUNI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	4,675,000	-100.00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	11,606,960	10,885,738	6.63
Jumlah	11,606,960	15,560,738	-25.41

*Realisasi Belanja
Negara
Rp7.135.356.221*

B. 2 Belanja

Akumulasi Realisasi Belanja instansi per 30 Juni TA 2024 adalah sebesar Rp7.136.097.873 dengan adanya pengembalian belanja sebesar Rp741.652 maka realisasi belanja *netto* Rp7.135.356.221 atau 46,96% dari anggaran belanja sebesar Rp15.195.493.000.

Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2024

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	12,990,482,000	6,015,974,400	46.31
Belanja Barang	2,205,011,000	1,120,123,473	50.80
Belanja Modal	0	0	-
Total Belanja Kotor	15,195,493,000	7,136,097,873	46.96
Pengembalian	0	(741,652)	-
Jumlah	15,195,493,000	7,135,356,221	46.96

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan Belanja per 30 Juni TA 2023, total realisasi belanja per 30 Juni TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 5,34% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya penambahan 2 (dua) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 1 (satu) orang CPNS, dan 1 (orang) pegawai mutasi dari luar instansi Mahkamah Agung RI sehingga hal ini berpengaruh pada realisasi Belanja Pegawai;
2. Peningkatan belanja barang untuk mendukung aktivitas perkantoran dan pemeliharaan atas aset yang dimiliki agar tetap dalam kondisi baik sehingga pelayanan dan aktivitas perkantoran dapat berjalan dengan baik;
3. Tidak terdapat anggaran belanja modal pada tahun anggaran 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja
per 30 Juni TA 2024 dan 30 Juni 2023*

URAIAN	REALISASI PER 30 JUNI TA 2024	REALISASI PER 30 JUNI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	6,015,232,748	5,683,342,910	5.84
Belanja Barang	1,120,123,473	1,090,013,250	2.76
Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	7,135,356,221	6,773,356,160	5.34

Belanja Pegawai
Rp6.015.232.748

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.015.232.748 dan Rp5.683.342.910.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2024 naik sebesar 5.84% dari per 30 Juni TA 2023. Hal ini antara lain disebabkan karena adanya penambahan pegawai pada satker Pengadilan Tinggi Gorontalo yang terdiri dari 2 (dua) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 1 (satu) orang CPNS, dan 1 (satu) orang pegawai mutasi dari instansi di luar Mahkamah Agung RI.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023

URAIAN	REALISASI PER 30 JUNI TA 2024	REALISASI PER 30 JUNI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	5,299,758,765	5,023,311,037	5.50
Belanja Uang Makan PNS	145,819,000	157,582,000	(7.46)
Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	78,300,000	132,350,000	(40.84)
Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	410,000,000	370,100,000	10.78
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	73,993,635	-	-
Belanja Uang Makan PPPK	8,103,000	-	-
Jumlah Belanja Kotor	6,015,974,400	5,683,343,037	5.85
Pengembalian Belanja Pegawai	(741,652)	(127)	583,878
Jumlah Belanja	6,015,232,748	5,683,342,910	5.84

Belanja Barang
Rp1.120.123.473

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni TA 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.090.013.250 dan Rp1.090.013.250. Realisasi belanja barang naik sebesar 2.76% dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi diantaranya karena:

1. Terdapat kenaikan besaran gaji PPNPN per 1 Januari 2024;
2. Terdapat kenaikan biaya sewa *webhosting* dan bantuan sewa rumah bagi para hakim tinggi;
3. Terdapat peningkatan kegiatan pemeliharaan gedung kantor seperti

penyesuaian tata ruang PTSP menyesuaikan aturan standar pelayanan sesuai SK Dirjen Badilum nomor 2-114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 serta perbaikan ruang *Command Centre*;

4. Peningkatan kegiatan pemeliharaan rumah dinas seperti pengecoran halaman muka rumah dinas, pemasangan pintu ganda, perbaikan instalasi air, dan juga pemeliharaan rutin seperti pengecatan dan pangkas rumput.

*Perbandingan Realisasi Belanja Barang
per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023*

URAIAN	REALISASI PER 30 JUNI TA 2024	REALISASI PER 30 JUNI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	355,164,402	334,463,714	6.19
Belanja Barang Non Operasional	0	0	-
Belanja Barang Persediaan	33,285,600	34,497,656	(3.51)
Belanja Jasa	405,330,490	405,139,278	0.05
Belanja Pemeliharaan	221,638,636	174,346,002	27.13
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	104,704,345	141,566,600	(26.04)
Jumlah Belanja Kotor	1,120,123,473	1,090,013,250	2.76
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1,120,123,473	1,090,013,250	2.76

Satker Pengadilan Tinggi Gorontalo sudah tidak lagi mengalokasikan anggaran terkait penanganan pandemi Covid-19 pada tahun 2024

Belanja Modal Rp0

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 30 Juni TA 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Tidak terdapat anggaran belanja modal baik pada tahun anggaran 2024 maupun tahun anggaran 2023.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023*

URAIAN	REALISASI PER 30 JUNI TA 2024	REALISASI PER 30 JUNI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	-
Belanja Modal Lainnya	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian Belanja	0	0	-
Jumlah Belanja	0	0	-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp60.855.206

C.1 Aset Lancar

Jumlah Aset Lancar Pengadilan Tinggi Gorontalo per 30 Juni 2024 dan per 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp60.855.206 dan Rp26.676.032.

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak pelaporan.

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp50.100.000

C.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp50.100.000 dan Rp0 dengan rincian sebagai berikut :

*Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2024
dan Per 31 Desember 2023*

Uraian	30-Jun-24	31-Dec-23
Uang Tunai	50,100,000	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	50,100,000	-

Belanja Dibayar
Dimuka (Prepaid)
Rp0

C.1.2 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp9.473.850. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima sepenuhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian Belanja Dibayar Dimuka Per 30 Juni 2024
dan Per 31 Desember 2023

Jenis	30-Jun-24	31-Dec-23
Sewa Web Hosting	-	9,473,850
Sewa Mesin Fotocopy sewilayah PT Gorontalo	-	-
Jumlah	-	9,473,850

Piutang Bukan Pajak Rp1.722.291

C.1.3 Piutang Bukan Pajak

Piutang bukan pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan.

Piutang Bukan Pajak berasal dari piutang lainnya yaitu berupa potongan SPM gaji atas sewa rumah dinas hakim dan pegawai.

Piutang bukan pajak per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.722.291 dan Rp0.

Piutang Bukan Pajak (Netto) Rp1.722.291

C.1.4 Piutang Bukan Pajak (Netto)

Piutang bukan pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan. Piutang bukan pajak per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.722.291 dan Rp0. Piutang Bukan Pajak (Netto) berupa potongan sewa rumah dinas Ketua, Wakil Ketua dan Panitera yang menempati Rumah Negara Golongan I Tipe B, dan 2 (dua) orang Hakim Tinggi yang menempati Rumah Negara Golongan II Tipe C. Piutang Bukan Pajak diperoleh dari potongan SPM Gaji Bulan Juli 2024 atas besaran nilai sewa rumah dinas.

Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2024
dan Per 31 Desember 2023

Jenis	30-Jun-24	31-Dec-23
Piutang Lainnya	1,722,291	-
Jumlah	1,722,291	-

Persediaan Rp9.032.915

C.1.5 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp9.032.915 dan Rp17.202.182.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan Per 30 Juni 2024
dan Per 31 Desember 2023

Persediaan	30-Jun-24	31-Dec-23
Barang Konsumsi	7,546,315	12,280,882
Bahan untuk Pemeliharaan	1,486,600	4,921,300
Jumlah	9,032,915	17,202,182

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Nilai persediaan yang tersaji di Neraca sudah sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik dengan nomor : 1203/SEK.PT.W20/KKA/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024.

Aset Tetap
Rp20.864.167.692

C.2 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap Pengadilan Tinggi Gorontalo per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp20.864.167.692 dan Rp21.158.209.814.

Aset Tetap merupakan Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Pengadilan Tinggi Gorontalo berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah
Rp7.602.649.000

C.2.1 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Tinggi Gorontalo per 30 Juni 2024 masih sama dengan nilai aset per 31 Desember 2023 masing-masing adalah Rp7.602.649.000 dan Rp7.602.649.000.

Tabel Mutasi Tanah

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	7,602,649,000
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 30 Juni 2024	7,602,649,000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	0
Nilai Buku per 30 Juni 2024	7,602,649,000

Rincian saldo Tanah per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Tanah

NO	KIB	LUAS (m ²)	NO. SERTIFIKAT	ATAS NAMA	PERUNTUKAN	JUMLAH
1	2	5,693	31.01.03.05.2.00037	Pemerintah RI cq Mahkamah Agung	Gedung Kantor PT. Gorontalo	5,845,918,000
2	4	10,750	30.01.08.04.4.00027	PEMPROV GORONTALO	Gedung Kantor PT. Gorontalo (nonaktif)	550,730,000
3	1	780	31.01.05.08.2.00010	Pemerintah RI cq Mahkamah Agung	Rumah Dinas KPT, WKPT, Panitera,	302,865,000
4	1	2,370	31.01.05.08.2.00036	Pemerintah RI cq Mahkamah Agung	Sekretaris, dan Hakim Tinggi	903,136,000
J U M L A H						7,602,649,000

Peralatan dan
Mesin
Rp5.285.284.031

C.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp5.285.284.031 dan Rp5.285.284.031.

Rincian mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	5,285,284,031
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Mutasi kurang:	
Transfer Keluar	0
Reklasifikasi Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Saldo per 30 Juni 2024	5,285,284,031
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	(4,767,980,136)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	517,303,895

Rincian aset tetap peralatan dan mesin disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang Peralatan dan Mesin pada periode Semester I Tahun 2024.

Gedung dan
Bangunan
Rp15.399.408.200

C.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp15.399.408.200 dan Rp15.399.408.200.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	15,399,408,200
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	0
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan	0
Saldo per 30 Juni 2024	15,399,408,200
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	(2,667,905,308)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	12,731,502,892

Rincian aset tetap gedung dan bangunan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

C.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Rincian Mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	0
Mutasi tambah:	
Revaluasi aset	0
Mutasi kurang:	
Koreksi kesalahan input IP	0
Saldo per 30 Juni 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	0
Nilai Buku per 30 Juni 2024	0

Rincian aset tetap jalan, irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya Rp28.199.905

C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp28.199.905 dan Rp28.199.905. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian dan buku perpustakaan (monografi).

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Aset Tetap Lainnya

Uraian	30-Jun-24	31-Dec-23
Buku Perpustakaan	12,711,905	12,711,905
Alat Musik Modern (Keyboard)	15,488,000	15,488,000
Jumlah	28,199,905	28,199,905

Tabel Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	28,199,905
Mutasi tambah:	
Transfer masuk monografi	0
Mutasi kurang:	
Saldo per 30 Juni 2024	28,199,905
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	(15,488,000)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	12,711,905

Buku Perpustakaan tidak mengalami penyusutan

Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp7.451.373.444

C.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap dilakukan pada setiap semester. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp7.451.373.444 dan Rp7.157.331.322.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5,285,284,031	4,767,980,136	517,303,895
2	Gedung dan Bangunan	15,399,408,200	2,667,905,308	12,731,502,892
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	28,199,905	15,488,000	12,711,905
	Akumulasi Penyusutan	20,712,892,136	7,451,373,444	13,261,518,692

Buku Perpustakaan yang merupakan aset tetap lainnya tidak mengalami penyusutan.

Rincian akumulasi penyusutan asset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya Rp0

C.3 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Pengadilan Tinggi Gorontalo per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Pengadilan Tinggi Gorontalo terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Tak Berwujud
Rp29.985.000

C.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp29.985.000 dan Rp29.985.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	29,985,000
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 30 Juni 2024	29,985,000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	(29,985,000)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	0

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak berwujud

Uraian	Nilai
Software	29.985.000
Jumlah	29.985.000

Aset Lain-Lain Rp0

C.3.2 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-Lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Tidak terdapat Aset Lain-lain pada Pengadilan Tinggi Gorontalo

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel Rincian Mutasi Aset Lain-Lain

Saldo per 31 Desember 2023	0
Mutasi tambah:	
Reklas dari Aset Tetap	0
Mutasi kurang:	
Penghapusan BMN	0
Saldo per 30 Juni 2024	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2024	0
Nilai Buku per 30 Juni 2024	0

Akumulasi
Penyusutan/Amortisasi
Aset Lainnya
Rp29.985.000

C.3.3 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo akumulasi penyusutan/amortisasi per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp29.985.000 dan Rp29.985.000. Akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan/Amortisasi

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud (Software)	29,985,000	29,985,000	0
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	0	0
Jumlah	29,985,000	29,985,000	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp796.274.974

C.4 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Tinggi Gorontalo per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp796.274.974 dan Rp25.369.867.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp745.536.974

C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp745.536.974 dan Rp25.369.867. Utang pada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Rp 709,485,974	Gaji Pegawai Bulan Juli 2024
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Rp 36,051,000	Gaji PPNPN Bulan Juli 2024
Total		Rp 745,536,974	

Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp638.000

C.4.2 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai utang yang belum ditagihkan per 30 Juni 2024 sebesar Rp638.000 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0. Utang yang belum Ditagihkan sampai dengan 30 Juni 2024 ini merupakan pengeluaran UP berupa barang maupun jasa yang belum dilakukan penggantian atau pertanggungjawaban UP. Nilai tersebut berasal dari BAST persediaan nomor 00018/UP_TUP/664539/2024 tanggal 27 Juni 2024.

Uang Muka dari
KPPN
Rp50.100.000

C.4.3 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp50.100.000 dan Rp0, merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas
Rp20.128.747.924

C.5 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp20.128.747.924 dan Rp21.159.515.979.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp13.329.251

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp13.329.251 dan Rp12.536.243. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Per 30 Juni 2024 dan Per 30 Juni 2023

URAIAN	PER 30 JUNI TA 2024	PER 30 JUNI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Dari Pemanfaatan BMN	13,329,251	12,536,243	6.33
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	13,329,251	12,536,243	6.33
Pendapatan Lain-Lain	-	-	-
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	-	-
Jumlah	13,329,251	12,536,243	6.33

Pendapatan akrual pada satker Pengadilan Tinggi Gorontalo berasal dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan yaitu pendapatan dari sewa 5 (lima) unit rumah dinas dan pendapatan dari sewa sebagian tanah kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo yang dipergunakan untuk usaha kantin.

Beban Pegawai
Rp6.701.405.753

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp6.701.405.753 dan Rp6.323.212.562. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai Per 30 Juni 2024 dan Per 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BEBAN	PER 30 JUNI TA 2024	PER 30 JUNI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji PNS	1,850,930,740	1,722,478,460	7.46
Beban Pembulatan Gaji PNS	20,954	21,521	(2.63)
Beban Uang Makan PNS	145,163,000	157,582,000	(7.88)
Beban Tunjangan-Tunjangan PNS	4,074,992,959	3,878,530,581	5.07
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	89,100,000	144,500,000	(38.34)
Beban Tunjangan Hakim Ad Hoc	460,000,000	420,100,000	9.50
Beban Gaji PPPK	57,664,800	-	-
Beban Pembulatan Gaji PPPK	864	-	-
Beban Uang Makan PPPK	6,697,000	-	-
Beban Tunjangan-Tunjangan PPPK	16,835,436	-	-
Jumlah	6,701,405,753	6,323,212,562	5.98

Beban Persediaan
Rp34.827.567

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp34.827.567 dan Rp74.274.940. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Persediaan per 30 Juni 2024 dan Per 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BEBAN	PER 30 JUNI TA. 2024	PER 30 JUNI TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	34,827,567	74,274,940	(53.11)
Jumlah	34,827,567	74,274,940	(113.26)

Beban Barang dan
Jasa
Rp803.962.844

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp803.962.844 dan Rp781.112.589. Beban Barang dan Jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Secara keseluruhan terjadi kenaikan pada Beban Barang dan Jasa dibanding, hal ini antara lain disebabkan karena:

1. Adanya peningkatan besaran nilai gaji PPNPN sehingga berakibat pada naiknya Beban Keperluan Perkantoran;
2. Naiknya besaran sewa *webhosting* dan juga bantuan sewa rumah bagi hakim juga mengakibatkan naiknya Beban Sewa.

Meskipun secara keseluruhan Beban Barang dan Jasa mengalami kenaikan, namun terdapat beberapa penurunan pada beberapa pos beban yang antara lain disebabkan karena:

3. Turunnya beban langganan daya yang disebabkan karena pembayaran tagihan listrik satker dibebankan kepada DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Penggunaan aplikasi terpusat seperti Aplikasi E-Sadewa, E-BIMA, dan Komdanas dalam pengelolaan BMN dan keuangan menyebabkan berkurangnya frekuensi surat menyurat secara fisik;

5. Terdapat penyesuaian besaran Honor Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang dan Jasa mengikuti peraturan terbaru dimana pengelola barang dan jasa yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan barang dan jasa berhak memperoleh honor operasional satuan kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium Pengelolaan Keuangan. Hal ini menyebabkan turunnya Beban Honor Operasional Satuan Kerja.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni Tahun 2024 dan Per 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BEBAN	PER 30 JUNI TA. 2024	PER 30 JUNI TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional Lainnya	0	0	0.00
Beban Langganan Daya dan Jasa	8,233,592	16,762,098	-50.88
Beban Jasa Surat Dinas Pos Pusat	5,372,500	5,797,500	-7.33
Beban Sewa	404,513,850	396,585,777	2.00
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	26,649,000	46,911,000	-43.19
Beban Bahan	0	0	0.00
Beban Keperluan Perkantoran	359,193,902	315,056,214	14.01
Jumlah	803,962,844	781,112,589	2.93

*Beban
Pemeliharaan
Rp228.903.936*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp228.903.936 dan Rp203.934.998. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Secara keseluruhan terjadi kenaikan Beban Pemeliharaan diantaranya terjadi karena:

1. Peningkatan kegiatan perbaikan rumah dinas seperti pengecoran area halaman rumah dinas, pemasangan pintu ganda pada rumah dinas KPT dan WKPT, perbaikan jaringan air, serta pemeliharaan rutin seperti pengecatan dan potong rumput.
2. Beberapa kendaraan bermotor untuk pembayaran pajak 5 (lima) tahunan jatuh tempo pembayaran pada periode Semester I tahun 2024, selain terdapat penggantian aki pada beberapa kendaraan roda 4 (empat).

Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2024 dan Per 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BEBAN	PER 30 JUNI TA. 2024	PER 30 JUNI TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	75,093,075	77,445,475	-3.04
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	0.00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	36,183,400	9,859,562	266.99
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	110,362,161	87,040,965	26.79
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	7,265,300	29,588,996	-75.45
Jumlah	228,903,936	203,934,998	12.24

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp104.704.345*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp104.704.345 dan Rp141.566.600. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Terjadi penurunan Beban Perjalanan Dinas yang disebabkan penyelenggaraan rapat koordinasi secara daring sehingga frekuensi perjalanan dinas menjadi berkurang. Selain itu penyelenggaraan konsolidasi laporan keuangan audited 2023 yang diselenggarakan pada awal tahun 2024, beberapa komponen perjalanan dinas dibebankan pada DIPA Eselon I. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2024 dan Per 30 Juni 2023

URAIAN JENIS BEBAN	PER 30 JUNI TA. 2024	PER 30 JUNI TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	99,154,345	137,066,600	-27.66
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,550,000	4,500,000	23.33
Jumlah	104,704,345	141,566,600	-26.04

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp294.042.122*

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni 2024 dan per 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp294.042.122 dan Rp322.718.855. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa

manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2024 dan Per 30 Juni 2023

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	PER 30 JUNI TA. 2024	PER 30 JUNI TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	126,332,706	144,856,753	-12.79
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	167,709,416	163,241,675	2.74
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	-	14,620,427	-100.00
Jumlah Beban Penyusutan	294,042,122	322,718,855	-8.89
Beban Amortisasi Software	0	0	0.00
Jumlah Amortisasi	0	0	0.00
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	294,042,122	322,718,855	-8.89

Kegiatan Non Operasional Rp0

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing Rp0 dan Rp0. Rincian Kegiatan Non Operasional adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Kegiatan Non Operasional Per 30 Juni 2024 dan Per 30 Juni 2023

URAIAN	PER 30 JUNI TA. 2024	PER 30 JUNI TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	4,675,000	-100.00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	2,224,750	-100.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	2,450,250	-100.00

Pos Luar Biasa Rp0

D.9 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri atas Pendapatan dan Beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada diluar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp21.159.515.979*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan TA 2023 adalah masing-masing sebesar Rp21.159.515.979 dan Rp21.564.833.908.

*Defisit LO
Rp8.154.517.316*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp8.154.517.316 dan Rp7.831.834.051. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan/Kesalahan
Mendasar Rp0*

E.3 Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 masing-masing sebesar Rp0 dan 0.

*Penyesuaian Nilai
Aset Rp0*

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir. Penyesuaian Nilai Aset Per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 30 Juni 2024 adalah Rp0 dan 30 Juni 2023 adalah Rp0.

*Koreksi Atas
Reklasifikasi Rp0*

E.3.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

Merupakan koreksi atas reklasifikasi persediaan/aset tetap/aset lainnya yang dihasilkan dari transaksi Reklasifikasi Masuk dan Keluar BMN dari aplikasi persediaan.

Untuk periode hingga 30 Juni 2024 adalah Rp0 dan 30 Juni 2023 adalah Rp0.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0*

E.3.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing

sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non Revaluasi
Rp0

E.3.6 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Koreksi nilai aset tetap non revaluasi per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Koreksi Lain-Lain
Rp0

E.3.7 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-
Jumlah	-

Transaksi Antar
Entitas
Rp7.123.749.261

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.123.749.261 dan Rp6.775.164.172. Transaksi Antar Entitas adalah Transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	7,135,356,221
Diterima dari Entitas Lain	(11,606,960)
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	7,123,749,261

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024,

DDEL sebesar Rp11.606.960 sedangkan DKEL sebesar Rp7.135.356.221.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp0 sedangkan Transfer Keluar sampai dengan 30 Juni 2023 sebesar Rp0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan hibah langsung sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar 0.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp0.

Ekuitas Akhir
Rp20.128.747.924

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp20.128.747.924 dan Rp20.508.164.029.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Sejak awal tahun anggaran 2012 pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak terdapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

F.2.2 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL

Sampai dengan periode 30 Juni Tahun Anggaran 2024 tidak Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual untuk Pengadilan Tinggi Gorontalo Kode Anggaran 005.01.

F.2.3 REKENING PEMERINTAH

Rekening Bendahara Pengeluaran

Rekening yang dimiliki Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah *Virtual Account* atas nama BPG 050 Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo pada Bank BRI Cabang Gorontalo, Nomor rekening : 653246645391000. Data dapat dilihat pada lampiran.

F.2.4 REVISI DIPA

Sampai dengan 30 Juni 2024 Pengadilan Tinggi Gorontalo telah melakukan revisi terhadap DIPA sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebagai berikut :

1. Revisi DIPA ke-01 tanggal 03 April 2024, yaitu pemutakhiran data hasil revisi POK dan pencantuman/perubahan Rencana Penarikan Dana atau perkiraan penerimaan pada Halaman III DIPA;
2. Revisi DIPA ke-02 tanggal 05 Juni 2024, berupa pemutakhiran data hasil revisi POK dan pencantuman/perubahan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA.

F.2.5 RALAT SPM, SSBP, DAN SSPB

F.2.5.1 RALAT SPM

Sampai dengan akhir periode 30 Juni 2024 Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak ada ralat SPM.

F.2.5.2 Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)

Sampai dengan akhir periode 30 Juni 2024 pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Gorontalo tidak ada pengembalian belanja.

F.2.6 CATATAN PENTING LAINNYA

Berdasarkan Surat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI No 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya Tahun Anggaran 2024, telah ditunjuk Sekretaris Pengadilan Tinggi Gorontalo sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang dalam kegiatan sebagaimana tercantum dalam DIPA Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Serta Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: W20.U/2224/KU.01/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 Tentang Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: W20.U/2220/KU.01/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Nomor: W20.U/2221/KU.01/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pengadilan Tinggi Gorontalo, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: W20.U/2222/KU.01/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan Pengadilan Tinggi Gorontalo, berikut Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2024,

Pejabat Pembuat Komitmen	: Herdi Pakaya, SH
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Nurmiraningsi Otoluwa, SE
Bendahara Pengeluaran	: Meyke Rahim, A.Md
Bendahara Penerima	: Novawati Monoarfa, A.Md
PPABP	: Jafar Potale

Tidak terdapat perubahan Pejabat Pengelola Keuangan pada Tahun Anggaran 2024 dari periode sebelumnya.

Lampiran A1

Pengadilan Tinggi Gorontalo
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi,
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2024

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Beban Peny.	Total Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31 Des 2023	Per 30 Juni 2024	Per 30 Juni 2024	Per 30 Juni 2024
A	Tanah						
1	Tanah	-	7,602,649,000	-	-	-	7,602,649,000
	Jumlah		7,602,649,000	-	-	-	7,602,649,000
B	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Angkutan	7	1,087,793,556	(1,087,793,556)		(1,087,793,556)	0
2	Alat Bengkel dan Alat Ukur	7	1,704,500	(1,704,500)		(1,704,500)	0
3	Alat Pertanian	5	28,280,000	(28,280,000)		(28,280,000)	0
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4	2,342,603,610	(2,045,634,907)	(53,281,553)	(2,098,916,460)	243,687,150
5	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	5	575,558,590	(374,980,193)	(35,534,959)	(410,515,152)	165,043,438
6	Kursi Dorong	4	1,348,000	(943,600)	(134,800)	(1,078,400)	269,600
7	Alat Laboratorium	5	51,080,000	(19,188,501)	(2,862,042)	(22,050,543)	29,029,457
8	Komputer	5	1,196,915,775	(1,083,122,173)	(34,519,352)	(1,117,641,525)	79,274,250
	Jumlah		5,285,284,031	(4,641,647,430)	(126,332,706)	(4,767,980,136)	517,303,895
C	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung	50	14,514,776,200	(2,344,289,448)	(156,884,801)	(2,501,174,249)	12,013,601,951
2	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50	884,632,000	(155,906,444)	(10,824,615)	(166,731,059)	717,900,941
	Jumlah		15,399,408,200	(2,500,195,892)	(167,709,416)	(2,667,905,308)	12,731,502,892
D	Jalan dan Jembatan						
1	Jalan Khusus Kompleks	40	0	-	-	-	-
	Jumlah		0	-	-	-	-
E	Irigasi						
1	Bangunan Air	40	0	-	-	-	-
	Jumlah		0	-	-	-	-
F	Jaringan						
1	Instalasi Gardu Listrik Induk	40	0	-	-	-	-
2	Jaringan Listrik Lainnya	40	0	-	-	-	-
	Jumlah		0	-	-	0	0
G	Aset Tetap Lainnya						
1	Alat Musik Modern/Band	40	15,488,000	(15,488,000)	-	(15,488,000)	-
2	Buku Perpustakaan		12,711,905	-	-	-	12,711,905
	Jumlah		28,199,905	(15,488,000)	-	(15,488,000)	12,711,905
H	Software						
1	Aset Tak Berwujud	4	29,985,000	29,985,000	-	29,985,000	-
	Jumlah		29,985,000	29,985,000	-	29,985,000	-
I	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan						
1	Alat Kantor dan Rumah Tangga		-	-	-	-	-
2	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		-	-	-	-	-
3	Alat Laboratorium		-	-	-	-	-
4	Komputer		-	-	-	-	-
	Jumlah		0	-	0	0	-
	Total		28,345,526,136	(7,127,346,322)	(294,042,122)	(7,421,388,444)	20,864,167,692

*Tanah dan buku tidak mengalami penyusutan

Lampiran A2**LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024**

Kementerian/Lembaga : (005) Mahkamah Agung RI
Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
Satuan Kerja : (664539) Pengadilan Tinggi Gorontalo
Fungsi : Ketertiban dan Keamanan
Sub Fungsi : Peradilan
Program : Program Dukungan Manajemen
Lokasi : (31) Gorontalo

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Layanan Perkantoran	Rp 15,195,493,000	Rp 7,136,097,873	46.96	1	1	Kegiatan	49.98	Realisasi RO layanan perkantoran
	Subtotal	Rp 15,195,493,000	Rp 7,136,097,873	46.96	1	1	0	49.98	
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalia		-Rp741,652						
	Total	Rp 15,195,493,000	Rp 7,135,356,221	46.96	1	1	0	49.98	